PEMIKIRAN HANNAH ARENDT MENGENAI KEKERASAN DALAM KEKUASAAN

YEREMIAS JENA*

Abstract: Hannah Arendt rejects the idea that violence is a justified means of defending democratic power. For her, violence can only be justified as “a last resort” to combat anarchists and dissidents who oppose democratic power. This article shows that exercising democratic rule in a *polis* supported by the use of violence as a last resort, on the one hand, may lead to a tyranny of the majority, given the fact that the democratic political discourse is determined mostly by those with a certain level of education, economic circumstances, social status, and a wide access to information; and, on the other hand, the use of violence as a last resort could become the ground for the state to repress its people in the name of national security. This article maintains the position that the combination of participatory democracy proposed by Hannah Arendt and the constitutional democracy commonly practiced today can overcome the danger of a tyranny of the majority as well as prevent the abuse of power by a democratic ruler.

Keywords: Violence, power, democracy, *polis*, speech, action, public discourse.

Abstrak: Menurut Hannah Arendt, kekerasan tidak dapat dibenarkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan yang demokratis. Kekerasan hanya dapat dibenarkan sebagai “pertahanan terakhir” dalam menghadapi para pengacau dan pembangkang kekuasaan demokratis. Artikel ini menunjukkan bahwa, di satu pihak, kekuasaan demokratis dalam sebuah *polis* yang didukung oleh praktik kekerasan yang sah sebagai pertahanan terakhir justru berbahaya karena dapat menciptakan tirani mayoritas, mengingat bahwa diskursus politik yang demokratis sebagai watak utamanya kerap kali lebih ditentukan oleh para peserta dari tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, status sosial tertentu, dengan

* Yeremias Jena, Departemen Etika, Fakultas Kedokteran, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jl. Pluit Raya 2, Jakarta Utara. E-mail: yeremias.jena@gmail.com.

akses luas terhadap informasi. Di lain pihak, penggunaan kekerasan sebagai “pertahanan terakhir” dapat menciptakan kesewenangan negara dalam menindas rakyatnya atas nama keamanan nasional. Artikel ini mempertahankan posisi bahwa gabungan antara demokrasi partisipatoris sebagaimana diusulkan Hannah Arendt dan demokrasi konstitusional yang lazim dipraktikkan dewasa ini dapat menjadi jalan keluar dalam mengatasi bahaya tirani mayoritas sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan yang demokratis.

Kata-kata Kunci: Kekerasan, kekuasaan, demokrasi, *polis*, perkataan, tindakan.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 1969 Hannah Arendt menerbitkan sebuah tulisan dalam *New York Review of Books* berjudul “*Reflections on Violence*.” Tulisan pendek itu cukup memicu perdebatan, terutama pada pertanyaan apakah tepat kekerasan diposisikan sebagai sebuah tindakan politik? Mengapa kekerasan yang lazim dipahami sebagai manifestasi kekuasaan politik justru ditolak? Mengapa Arendt memahami kekerasan sebagai pilihan terakhir untuk mempertahankan kekuasaan yang demokratis dan sah (*legitimate*)? Meski tidak sekontroversial *Eichmann in Jerusalem*, ketika refleksi atas kekerasan ini diterbitkan oleh penerbit *A Harvest Book*, gagasan filsafat politik Arendt ini langsung menjadi bahan diskusi secara luas.¹ Mereka yang terbiasa dengan gagasan Arendt mengenai birokrasi, kekuasaan totaliter, teror sebagai media pelenyapan identitas individu serta kesadaran politik warga negara, atau konsep kekuasaan dalam *The Human Condition*² segera menyadari betapa buku kecil ini melanjutkan dan mempertegas gagasan-gagasan dasar filsafat politik yang sudah dikemukakan Arendt sebelumnya.

1 Lihat Yeremias Jena, “Kejahatan yang Banal dan Kekerasan Oleh Negara: Refleksi Hannah Arendt atas Pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem,” *Respons* 14 (2009): 147-176.

2 Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1998).

Dua kenyataan politik memicu penulisan *On Violence*.³ Pertama, pandangan tradisional Eropa yang memosisikan kekerasan dan perang sebagai realisasi paling nyata dari kekuasaan. Kekerasan telah menjadi alat politik untuk mempertahankan atau mengekspansi kekuasaan, dan hanya dalam hubungannya dengan kekuasaanlah kekerasan menemukan *raison d'être*-nya.⁴ Bagi Arendt, kekerasan sebagai alat untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan kehilangan pamornya persis ketika pengembangan senjata mengakhiri logika kekuasaan “penguasa” dan “yang dikuasai” serta membawanya kepada sebuah penghancuran total keduanya.

Kedua, jika benar apa yang diramalkan Lenin bahwa abad ke-19 adalah abad penuh peperangan antarbangsa, kekerasan seharusnya menemukan momentumnya untuk merealisasikan diri. Jika kekerasan menjadi denominator utama berbagai perang antarbangsa, hasil akhir yang dicapai seharusnya siapa yang kalah dan siapa yang menang. Yang menguasai teknologi perang akan meraih kemenangan sekaligus memosisikan diri sebagai yang memiliki kekuasaan atas bangsa-bangsa lain. Padahal yang terjadi bukanlah perang antarbangsa, tetapi semacam “permainan catur” perlombaan senjata dengan tujuan akhir pemusnahan manusia.⁵

Melalui *On Violence* Arendt menunjukkan bahwa kekerasan akan terus ada karena menjadi bagian tak terpisahkan dalam praktik politik. Kekerasan tentu dapat dimanfaatkan oleh rezim politik tertentu sebagai alat untuk mempertahankan atau mengekspansi kekuasaan; misalnya kekerasan sebagai sarana pembebasan kelompok proletar merebut sarana-sarana produksi dari tangan pemilik modal dan mengkonstruksi masyarakat tanpa kelas seturut pemahaman Karl Marx. Arendt mem-

3 Hannah Arendt, *On Violence* (New York: A Harvest Book, 1970).

4 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 3.

5 “Demikianlah, peperangan ... telah kehilangan sebagian besar pamornya ... Tujuannya yang rasional adalah pemusnahan, bukan kemenangan, dan perlombaan senjata, bukan lagi sebuah persiapan untuk perang, kini hanya dapat dibenarkan berdasarkan alasan bahwa semakin banyak pemusnahanlah jaminan yang terbaik bagi tercapainya perdamaian.” Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 3-4.

buktikan bahwa para pemuja kekerasan (Karl Marx, Georges Sorel, John Paul Sartre, atau kelompok Kiri Baru dan sebagainya) yang memosisikan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, justru menghadapi kenyataan bahwa kekerasan dengan karakteristik yang demikian telah menghancurkan dirinya.⁶

Bagaimana kekerasan dengan wataknya yang khas seperti ini dapat dipahami? Bagaimana Arendt menjelaskan hubungan antara kekerasan dan kekuasaan? Apakah dalam praktik politik yang demokratis dewasa ini, kekerasan dapat diandalkan sebagai sarana menegakkan konsensus awal atau cita-cita kehidupan bersama sebuah *polis*? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertama-tama penulis akan mendeskripsikan pendapat Arendt mengenai kekerasan. Setelah itu penulis akan menunjukkan penolakan Arendt terhadap kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan. Bagian ketiga akan menguraikan pandangan Arendt tentang kekuasaan dalam sebuah *polis* atau ruang publik. Bagian keempat merupakan kritik terhadap pandangan Arendt mengenai kekerasan dan kekuasaan dalam praktik politik dewasa ini. Pokok pikiran penting dan kritik atasnya akan ditegaskan kembali dalam bagian penutup artikel ini.

KEKERASAN DAN KEKUASAAN

Buku *On Violence* ditulis Arendt sebagai refleksi serius atas konteks politik abad ke-20 yang memahami kekerasan sebagai manifestasi yang mencolok dari kekuasaan.⁷ Arendt melihat bahwa kejadian-kejadian politik abad ke-20 seakan-akan membuktikan ramalan Lenin sebagai abad penuh peperangan dan revolusi.⁸ Menurut Arendt, penyimpulan semacam ini bukan tanpa alasan. Kekerasan-kekerasan yang terjadi selama abad ke-20 tidak dapat tidak dihubungkan dengan kekuasaan.

6 Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 4-5.

7 Arendt terutama mengutip para pemikir politik beraliran kiri maupun kanan yang tampaknya setuju bahwa "... tidak ada yang lebih atraktif melebihi kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan." Hannah Arendt, *On Violence*, p. 35.

8 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 3.

Penanda utama abad ke-20 adalah berakhirnya Perang Dunia II dan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempromosikan perdamaian dan kerja sama internasional. Kita baca dari sejarah dunia, bahwa Perang Dunia II berakhir setelah negara-negara Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China) mengalahkan negara-negara Poros (Jerman, Italia, dan Jepang) di hampir seluruh wilayah yang mereka kuasai. Tetapi ternyata berakhirnya Perang Dunia II tidak mampu menyudahi praktik kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan. Lahirnya negara-negara adikuasa dan dimulainya babak baru Perang Dingin serta perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet seakan-akan membenarkan tesis bahwa hubungan internasional dibangun berdasarkan relasi kekuasaan dan kekerasan. Dalam pemikiran Arendt, pemahaman semacam ini kembali menegaskan apa yang dikatakan C. Wright Mill, bahwa "Watak politik selalu merupakan perjuangan demi kekuasaan; jenis kekuasaan tertinggi adalah kekerasan."⁹

Apakah kekerasan memang merupakan sebuah manifestasi dari kekuasaan? Analisis Arendt atas pemikiran Max Weber, Karl Marx, George Sorel, Jean Paul Sartre, dan gerakan Kiri Baru (*new left*) menegaskan kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan. Max Weber dan para pengikutnya berbicara mengenai kekerasan sebagai sarana untuk menjamin kepatuhan masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan (otoritas) persis ketika kekuasaan sendiri bersifat sah.¹⁰ Sementara itu, bagi Karl Marx, kekerasan adalah alat pemaksa di tangan kelas yang berkuasa untuk mempertahankan masyarakat komunis.¹¹ Menurut Arendt, kekuasaan aktual dalam pemahaman Karl Marx berada di tangan kelas berkuasa yang dalam masyarakat tanpa kelas justru memosisikan diri sebagai penindas (*the oppressor*).¹² Dalam konteks pemahaman yang demikian, badan-badan politik beserta instrumen-

9 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 35.

10 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 35. Bdk. David Popenoe, *Sociology*. 11th Edition (New Jersey: Prentice Hall, 1999), p. 458.

11 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 36.

12 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 11.

instrumennya tidak lebih dari representasi sebuah suprastruktur yang melulu koersif.¹³

Pandangan-pandangan lain yang memahami kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan berasal dari pemikiran George Sorel, Jean Paul Sartre, dan gerakan Kiri Baru (*new left*). Sebagai seorang pemuja kekerasan, Sorel berpendapat bahwa wujud paling nyata dari model kekuasaan dalam sebuah masyarakat borjuis adalah penderitaan, ketidakadilan, tidak dihormatinya martabat manusia, dan ketiadaan akses kepada kekuasaan. George Sorel, menurut Arendt, membayangkan terbentuknya sebuah masyarakat baru melalui kekuatan mogok umum (*general strike*) sanggup mengakhiri dominasi kekuasaan kaum borjuis.¹⁴

Sartre, menurut Arendt, berpendapat bahwa kekerasan tidak dapat dibendung, terutama jika hal itu dilakukan oleh orang yang paling malang (*the wretched of the earth*) demi merealisasikan kemanusiaannya.¹⁵ Arendt berpendapat bahwa Sartre, sama seperti George Sorel dan Karl Marx, membenarkan penggunaan kekerasan sebagai sarana demi membebaskan diri dari penindasan. Sartre sendiri, menurut Arendt, memahami keadaan ketertindasan sebagai keadaan di mana seseorang tidak mampu menjadi manusia atau menjadi dirinya sendiri. Melalui kekerasan, terutama kekerasan tak terkendalikan mirip amuk massa (*mad fury*), Sartre yakin bahwa kaum tertindas sanggup membebaskan diri dari kemalangan. Bagi Sartre, itulah satu-satunya cara mengembalikan harga diri dan kemanusiaannya. Mengutip Sartre, Arendt menulis, "*a man feels himself more of a man when he is imposing himself and making others the instruments of his will.*"¹⁶ Sartre tampak mendukung kekerasan melalui apa yang disebutnya sebagai "amuk massa" (*mad fury*) selaku sarana bagi kaum tertindas untuk mengembalikan harga diri dan kemanusiaannya.¹⁷

13 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 36.

14 Menurut Arendt, usulan George Sorel ini mirip dengan apa yang dewasa ini dikenal sebagai "politik non-kekerasan." Hannah Arendt, *On Violence*, p. 12.

15 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 12.

16 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 36.

17 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 12.

Kaum Kiri Baru (*new left*), menurut Arendt, berpendapat bahwa kekerasan dapat menjadi alat untuk merealisasikan diri.¹⁸ Bagi mereka, “kekuasaan hanya dapat lahir dari dalam sepucuk senjata” sebagaimana diproklamasikan oleh Mao Tse-tung.¹⁹ Memang tidak banyak yang dikatakan Arendt mengenai kaum Kiri Baru. Yang jelas, gerakan Kiri Baru yang lahir di Eropa selama tahun 1950 dan 1960-an berupaya untuk mengkritik penyelewengan ajaran-ajaran Karl Marx oleh Stalin. Para penganutnya justru menemukan pemikiran-pemikiran Marx, terutama setelah *Paris Manuscript 1844* ditemukan dan terbuka bagi mereka.²⁰

Telaah historis ini menunjukkan betapa kekerasan diterima sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan yang tidak sah. Menarik bahwa selain merujuk pada pemikir tertentu yang mendukung praktik kekerasan sebagai teror untuk memaksakan ketaatan warga negara dalam sebuah masyarakat non-demokratis, Arendt juga merujuk pada konteks historis di mana eksistensi kekuasaan non-demokratis diterima sebagai sah pada dirinya. Dapat disebut di sini kekuasaan absolut para raja dan pangeran di banyak negara Eropa sebelum abad ke-20 yang sebenarnya berakar pada bentuk pemerintahan warisan Yunani kuno yang menganggap pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang dalam monarki atau aristokrasi sebagai hal yang wajar. Arendt juga melihat bahwa kekerasan sebagai senjata mempertahankan kekuasaan non-demokratis pun diterima begitu saja dalam masyarakat yang mempercayai pemegang kekuasaan sebagai titisan Allah, atau memanfaatkan aspek psikologis manusia yang cenderung patuh pada kekuasaan karena rasa takut pada penguasa yang berpeluang menjadi sewenang-wenang.²¹

18 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 14.

19 Mengutip Mao Tse-tung: “*Power grows out of the barrel of a gun.*” Hannah Arendt, *On Violence*, p. 11.

20 Ian Adams, *Political Ideology Today* (New York: Manchester University Press, 2001), pp. 159-160.

21 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 38. Aspek psikologis manusia yang umumnya dimanfaatkan oleh penguasa non-demokratis dalam menuntut ketaatan warga negara adalah insting bawaan untuk taat, kecenderungan untuk patuh, dan kesediaan untuk

Arendt menggunakan telaah historis ini untuk menunjukkan bahwa kekerasan yang digunakan sebagai teror untuk mempertahankan kekuasaan yang non-demokratis bukan hanya tidak dapat dibenarkan dalam kekuasaan demokratis, tetapi juga merusak dan menghancurkan kekuasaan itu sendiri. Catatan historis ini menjadi rujukan bagi Arendt untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan yang dibangun di atas teror dan kekerasan tidak akan berumur panjang. Kekuasaan berwatak demikian akan segera mendapat perlawanan dan pembangkangan persis ketika ia kehilangan dukungan rakyat.²²

Posisi Arendt dapat dirumuskan demikian: hanya kekuasaan yang sah yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam mempertahankan kekuasaan. Sementara itu, kekuasaan non-demokratis yang menggunakan kekerasan sebagai teror demi mempertahankan kekuasaan hanya akan menghancurkan kekuasaan itu sendiri. Dalam arti apa Arendt "mensahkan" kekerasan dalam kekuasaan? Pertanyaan ini akan dijawab dalam uraian di bawah ini.

MEMBENARKAN KEKERASAN DALAM KEKUASAAN?

Di atas telah ditunjukkan bagaimana Arendt menolak pendapat yang membenarkan kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan. Bagi Arendt, dalam kondisi tertentu, kekerasan memang merupakan instrumen kekuasaan, tetapi bukan manifestasi kekuasaan itu sendiri. Apa maksudnya jika dikatakan bahwa kekerasan adalah instrumen yang tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri? Bagaimana Arendt mempertahankan pendapatnya bahwa kekerasan bukan manifestasi kekuasaan? Jika kekerasan bukanlah manifestasi kekuasaan, apakah Arendt hendak mengkonstruksi sebuah pemikiran mengenai kekuasaan tanpa kekerasan? Mungkinkah kekerasan absen sama sekali dari praktik kekuasaan?

Cara Arendt menolak pemikiran Max Weber, Karl Marx atau para pemuja kekerasan seperti George Sorel, Sartre, dan kaum Kiri Baru tam-

dikendalikan oleh orang yang lebih kuat. Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 39-40.

22 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 41.

pak sangat meyakinkan. Pertama-tama, Arendt mendeskripsikan terlebih dahulu pandangan dasar mereka sebelum mengkritik dan menolaknya. Demikianlah, ketika menolak pemikiran Max Weber—juga Karl Marx dan Sartre—yang membenarkan tindakan kekerasan sebagai alat pemaksa dalam meminta ketaatan warga negara, Arendt mengajukan sebuah pertanyaan kritis, “Jika kekerasan dalam praktik kekuasaan dipahami sebagai alat yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan, lalu apa bedanya praktik kekuasaan demikian dengan gerombolan bersenjata yang juga menggunakan kekerasan?”²³

Menurut Arendt, mereduksikan kekuasaan hanya sebagai kemampuan memerintah dan memaksa ketaatan warga negara di mana kekerasan menjadi alat untuk mencapai tujuan kekuasaan hanya akan menyamakan kekuasaan (*power*) dengan pemaksaan (*force*); padahal keduanya jelas berbeda. Kekerasan justru dapat menghancurkan kekuasaan karena membunuh kemampuan berpikir rasional sekaligus menolak konsensus “tujuan-tujuan politik dan publik” oleh seluruh anggota *polis*. Tentang hal ini, Arendt menulis, “*To substitute violence for power can bring victory, but the price is very high; for it is not only paid by the vanquished, but it is also paid by the victor.*”²⁴ Menurut Arendt, kekerasan dapat saja dipaksakan (*force*) demi mencapai kekuasaan, tetapi tujuan akhir yang dicapai bukanlah sebuah kekuasaan yang sah tetapi teror dan kehancuran kekuasaan itu sendiri.²⁵

Satu kata kunci untuk memahami penolakan Arendt, terhadap kekerasan sebagai manifestasi kekuasaan adalah aspek kejutan (*unpredictability*) dari setiap praktik kekuasaan.²⁶ Bagi Arendt, seharusnya per-

23 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 37.

24 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 53. Kekuasaan yang dicapai melalui kekerasan dalam pemahaman Hannah Arendt tidak bersifat sah karena menonjolkan tindakan (*action*) tanpa persetujuan mereka yang diperintah. Kekuasaan yang sah terealisasi dalam sebuah *polis* di mana semua anggotanya memiliki kemampuan “... *to act in concert for a public-political purpose.*” Maurizio Passerin d’Entreves, “Hannah Arendt”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), edited by Edward N. Zalta, <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/arendt/>. Diakses pada 11 Maret 2011.

25 Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 54-55.

26 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 5.

damaian dunia telah tercapai pasca Perang Dunia II jika kekuasaan menjadi alat yang ampuh di tangan penguasa demi efektifnya praktik kekuasaan.²⁷ Yang terjadi justru sebaliknya. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa ternyata tidak sanggup menghentikan perlombaan senjata antara blok Barat dan blok Komunis. Menurut Arendt, keliru jika para penguasa berpikir bahwa perdamaian tercapai menyusul kekalahan satu kubu dalam sebuah perang. Justru dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi senjata, kita menyaksikan pelipatgandaan sarana untuk mencapai tujuan.²⁸ Arendt menolak pandangan bahwa kekerasan dapat mengakhiri konflik. Para penguasa yang memosisikan kekerasan sebagai alat untuk mewujudkan kekuasaan lupa bahwa akhir dari sebuah perang bukanlah perdamaian tetapi keadaan penuh kejutan (*unpredictability*).²⁹

Aspek kejutan (*unpredictability*) juga nyata dalam gerakan Kiri Baru (*new left*) di abad ke-20.³⁰ Bagi Arendt, jika benar bahwa kekerasan adalah alat untuk mewujudkan tata dunia yang lebih baik, mengapa mahasiswa melakukan protes menentang aksi kekerasan yang dilakukan negara (misalnya dalam menolak Perang Vietnam)? Kaum Kiri Baru yang adalah para mahasiswa menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di kampus-kampus justru melayani kepentingan penguasa yang berorientasi perang. Protes para mahasiswa untuk mengakhiri perang adalah imperatif demi mencegah kehancuran total bangsa-bangsa.³¹

27 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 37.

28 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 4.

29 Arendt menyebut Perang Dunia II sebagai contoh. Perang yang menewaskan jutaan orang ini tidak berakhir dengan tercapainya perdamaian dunia, tetapi pengembangan teknologi senjata di mana seluruh sistem ekonomi dan politik diarahkan untuk mendukung proyek tersebut. Dalam konteks ini kekerasan yang semula dipercaya sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan bermetamorfosis menjadi kekuatan yang memicu konflik antarbangsa. Perkembangan ini menunjukkan bahwa memiliki senjata canggih tidak menjamin terpeliharanya perdamaian, karena kekuasaan tidak ditentukan oleh kepemilikan alat perang dan akumulasi kekayaan demi mendukung pengembangan senjata. Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 9-11.

30 Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 13-17.

31 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 17.

Salah satu cara Arendt mempertahankan pendapatnya bahwa kekerasan bukan manifestasi kekuasaan tetapi yang eksistensinya sebagai instrumen kekuasaan dalam kondisi tertentu diperbolehkan adalah dengan menelaah secara fenomenologis kekerasan (*violence*), kekuatan (*strength*), pemaksaan (*force*), dan otoritas (*authority*) dalam hubungan mereka dengan kekuasaan (*power*).³² Bagi Arendt, dalam konteks kekuasaan (*power*), keempat aspek ini sebenarnya saling berhubungan, karena mereka adalah sarana dengannya manusia menguasai atau memerintah sesamanya. Meskipun demikian, apakah “membolehkan” kekerasan dalam kekuasaan sama artinya dengan menyamakan kekerasan dengan kekuatan (*strength*), pemaksaan (*force*), dan otoritas (*authority*)? Mengapa Arendt berpendapat bahwa hanya kekerasan (*violence*) yang boleh digunakan dalam kekuasaan, sementara kekuatan, pemaksaan, dan otoritas harus ditolak?

Bagi Arendt, di satu pihak, kekerasan memang tidak sama dengan kekuatan (*strength*), pemaksaan (*force*), dan otoritas (*authority*), tetapi di lain pihak, hanya kekerasan yang karakter instrumentalnya cocok disandingkan dengan kekuasaan. Memang sepintas kekerasan tampak memiliki karakter yang sama dengan kekuatan, pemaksaan, dan otoritas. Meskipun demikian, kekuatan (*strength*) tidak pernah dapat disandingkan dengan kekuasaan (*power*) persis ketika kekuatan dapat dimiliki secara individual serta mudah ditaklukkan oleh kekuatan lain yang lebih besar. Sementara kekuasaan yang bersifat individual – menyandingkan kekuasaan dengan kekuatan – hanya akan melahirkan otoritarianisme. Di lain pihak, kekuasaan yang dipaksakan (*force*) justru membuahkan teror dan kekerasan yang menandai berakhirnya kekerasan sebagai instrumen kekuasaan. Demikian pula otoritas – seperti halnya kekerasan, kekuatan, dan pemaksaan – dapat menjadi sarana mencapai kekuasaan. Hanya

³² Yang ia maksudkan sebagai pendekatan fenomenologis adalah bagaimana memahami kekerasan sebagaimana konsep itu dipahami dan diterima masyarakat. Dalam pemahaman Hannah Arendt sendiri, pendekatan fenomenologis dimaksud sebagai usaha “memahami kekerasan sebagai sebuah fenomena dalam artinya yang sesungguhnya.” Membedakan kekerasan (*violence*) dari kekuasaan (*power*), kekuatan (*strength*), pemaksaan (*force*), dan otoritas (*authority*) adalah bagian dari upaya Arendt untuk memahami kekerasan secara fenomenologis. Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 35, 43.

saja, memiliki otoritas bagi Arendt belum berarti memiliki kekuasaan dalam arti yang otentik karena otoritas dapat dimiliki secara individual dan institusional dengan membenarkan pemaksaan sebagai sarana mencapai tujuan.

Melalui pembedaan ini, Arendt menegaskan pandangannya tentang kekuasaan (*power*). Kekuasaan bagi Arendt selalu dimengerti sebagai “*to act in concert*.” Hanya melalui sebuah komunitas politik atau *polis* yang demokratislah kekuasaan seperti ini menampilkan wataknya yang sebenarnya. Kekuasaan demokratis yang memberi ruang bagi perdebatan berbagai kepentingan dan tindakan politik akan menonjolkan persuasi sebagai seni memerintah, dan bukan kekerasan (*violence*), apalagi unjuk kekuatan (*strength*) atau pemaksaan (*force*). Kekuasaan sebagai “*to act in concert*” dimaksud sebagai seni (*art*) menyelenggarakan kehidupan bersama secara demokratis yang sanggup memadukan berbagai perbedaan menjadi cita-cita bersama.

Dalam konteks inilah kita mengerti mengapa Arendt menolak kekuatan (*strength*), pemaksaan (*force*), dan otoritas (*authority*) sebagai alat menegakkan kekuasaan. Bagi Arendt, kekuasaan tidak pernah menjadi milik seseorang, tetapi milik kelompok politik yang mengamanatkannya kepada seseorang. Ketika tidak lagi didasarkan pada persuasi dalam sebuah *polis*, kekuasaan akan menjadi kekuatan (*strength*) yang penanda utamanya adalah kemampuan individu memaksakan kekuasaannya. Jika kekuasaan yang kehilangan aspek persuasinya di mana perkataan (*words*) dan perbuatan (*deeds*) tidak lagi menjadi satu serta kehilangan dukungan seluruh anggota komunitas politik, kekuasaan tersebut mengakhiri *polis* itu sendiri sekaligus menghancurkan dirinya. Cepat atau lambat akan lahir kekuatan yang lebih besar dan berpotensi menghancurkan kekuasaan yang sifatnya individual.³³

33 Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 44-46. Distingui lebih lanjut mengenai kekuasaan (*power*), kekerasan (*violence*), kekuatan (*strength*), pemaksaan (*force*), dan otoritas (*authority*), dapat dilihat dalam Benyamin Molan, “Hannah Arendt: Kekerasan Bukan Tindakan Politik, Namun Bukan Tanpa Risiko,” *Respons* 14 (2009): 56-58.

Kekuasaan juga bukan sebuah fenomena alam di mana karena suatu keadaan, misalnya karena gerakan sosial, seseorang atau sekelompok orang menegaskan kekuasaan mereka atas orang lain. Bagi Arendt, kekuasaan bukanlah pemaksaan (*force*) di mana orang lain harus taat karena sekelompok orang tertentu mampu mendesakkan kekuasaan mereka.³⁴ Kekuasaan adalah prestasi bersama, karena merupakan pencapaian atau kesepakatan seluruh anggota komunitas melalui pertimbangan-pertimbangan bersama dalam setiap debat dan diskusi publik yang terbuka dan rasional.³⁵

Arendt juga menolak menyamakan kekuasaan dengan otoritas. Dalam kajian sosiologis, otoritas dianggap sebagai sumber khusus kekuasaan. Otoritas mendeskripsikan kekuasaan seseorang yang diperoleh karena kedudukannya.³⁶ Bagi Arendt, kekuasaan sebagai otoritas justru rapuh karena eksistensinya sangat ditentukan oleh “kesediaan dari pihak lain dalam memberi hormat dan mengakui legitimasi,” padahal tidak ada jaminan bahwa mereka yang taat akan terus menaruh hormat dan tidak mengkhianati otoritas tersebut.³⁷

Bagaimana dengan kekerasan? Bagi Arendt, menggunakan kekerasan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan justru akan menghancurkan kekuasaan itu sendiri.³⁸ Arendt memakai “revolusi” sebagai contoh untuk memberikan gambaran mengenai hal ini. Kekuasaan yang mempertahankan diri dengan melipatgandakan kemampuan sen-

34 Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 44-45. Di tempat lain Arendt menulis: “Kekerasan dan kekuasaan bukanlah fenomena alamiah, yakni manifestasi dari proses kehidupan; keduanya adalah bagian dari ranah politik menyangkut urusan manusia yang kualitas kemanusiaannya yang mendasar dijamin oleh kemampuannya dalam bertindak, kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru.” Hannah Arendt, *On Violence*, p. 82.

35 Maurizio Passerin d’Enteves, *Filsafat Politik Hannah Arendt* (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 131-132.

36 Arendt memberi contoh kekuasaan pejabat Gereja. Karena otoritas sebagai imam/klerus, kekuasaan yang dimilikinya ditaati oleh mereka yang terikat olehnya tanpa dipertanyakan lagi. Hannah Arendt, *On Violence*, p. 45.

37 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 45.

38 Mengenai hal ini, Arendt menulis: “Kekerasan selalu dapat menghancurkan kekuasaan ... pemerintahan yang semata-mata berdasarkan kekerasan muncul ketika kekuasaan telah menghilang... ” Hannah Arendt, *On Violence*, p. 50.

jata justru akan menghancurkan diri sendiri karena tidak pernah berhasil mencegah terjadinya revolusi. Masyarakat bahkan memiliki cara dan metode sendiri untuk menggerogoti dan melawan kekuasaan. Maka yang terjadi bukanlah ketaatan pada kekuasaan, tetapi pembangkangan dan perlawanan yang terus-menerus sebegitu rupa sehingga kekuasaan tidak pernah ditaati. Kekuasaan, dengan demikian, hanya akan menjadi lingkaran setan yang sulit diakhiri ketika penambahan senjata tidak mampu memaksa warga negara tunduk padanya.³⁹ Bagi Arendt, kekuasaan hanya dapat dipertahankan asal ketaatan padanya bukan berdasarkan relasi “perintah-ketaatan” (*command-obedience*), tetapi berdasarkan opini (kebebasan menyatakan pendapat) dan dukungan dari semua pihak dalam sebuah komunitas publik.⁴⁰

Meskipun demikian, menurut Arendt, kekerasan tidak pernah dapat dibersihkan dari kekuasaan. Dalam kekuasaan yang sah, kekerasan adalah pertahanan terakhir kekuasaan (*the last resort of power*) melawan kaum pemberontak, yakni individu atau kelompok yang menolak tunduk pada konsensus mayoritas. Sekali lagi Arendt mengingatkan bahwa yang ia maksudkan adalah penggunaan kekerasan untuk menegakkan kekuasaan yang sah berhadapan dengan mereka yang secara sengaja tidak tunduk pada konsensus bersama. Selain itu, justifikasi kekerasan dalam kekuasaan itu bukanlah kekuasaan yang sifatnya perorangan atau yang bertumpu pada satu orang, tetapi kekuasaan demokratis yang dijalankan demi tujuan hidup bersama. Mengenai hal ini, Arendt menulis: “... *violence functions as the last resort of power against criminals or rebels – that is, against single individuals who, as it were, refuse to be overpowered by the consensus of the majority.*”⁴¹

Jelas di sini bahwa eksistensi kekerasan sebagai pertahanan terakhir menegakkan kekuasaan hanya dapat dibenarkan dalam kekuasaan yang

39 Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 47-49.

40 Arendt menulis: “... ketika perintah tidak lagi ditaati, kekerasan sebagai alat tidak ada gunanya; dan persoalan ketaatan bukan ditentukan oleh hubungan yang memerintah dengan yang diperintah, tetapi melalui opini, dan, tentu saja, melalui pihak-pihak yang mengakuinya.” Hannah Arendt, *On Violence*, p. 49.

41 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 51

sah. Baginya, kekuasaan yang sah dibangun berdasarkan proses demokratis, yang memberi ruang bagi diskursus politik tentang kepentingan bersama. Bagi Arendt, kekerasan selalu merupakan instrumen kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa kekerasan tidak memiliki tujuan pada dirinya. Kekerasan yang disalahgunakan untuk merebut kekuasaan tidak bersifat sah dan karena itu eksistensinya tidak dibenarkan dalam sebuah komunitas politik. Sementara itu, kekuasaan sah yang eksistensinya dipertahankan dengan menggunakan kekerasan berhadapan dengan kaum pembangkang adalah kekuasaan yang pembentukannya merupakan sebuah perjanjian bersama di masa lalu dalam sebuah komunitas politik.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa Arendt memahami kekerasan sebagai alat di tangan penguasa yang sah dalam mempertahankan kekuasaan demokratis dan sah terhadap ancaman penghancuran atau perebutan kekuasaan oleh para pembangkang. Bagaimana gagasan mengenai eksistensi kekerasan dalam kekuasaan ini dapat dipraktikkan sebagai tindakan politik nyata? Praktik kekuasaan dalam *polis* akan memberikan gambaran bagaimana gagasan kekuasaan dan kekerasan menurut Arendt dapat direalisasikan sebagai sebuah tindakan politik.

MEWUJUDKAN KEKUASAAN DALAM *POLIS*

Alasan utama Arendt menolak kekerasan sebagai alat untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan adalah karena hakikat keduanya yang berbeda. Bagi Arendt, kekuasaan yang sah tidak dicapai melalui kekerasan. Kekuasaan adalah manifestasi sebuah tindakan bebas yang dilakukan bersama-sama orang lain dalam sebuah komunitas politik yang memberi ruang seluas-luasnya bagi diskusi, debat politik, dan perbedaan pandangan. Berbeda dengan kekuasaan yang tidak sah karena sifatnya yang tertutup dan anti diskursus, kekuasaan dalam pemahaman Arendt adalah sebuah konsensus yang sah di antara semua warga.

⁴² Bagi Arendt, "Pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya semata-mata pada kekerasan tidak pernah dapat bertahan lama." Hannah Arendt, *On Violence*, p. 50. Lihat juga Passerin d'Entevés, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, hlm. 52.

Bagaimana kekuasaan sebagai wujud dari konsensus bersama dalam sebuah tindakan politik yang bebas dapat dijelaskan? Maurizio Passerin d'Enteves membantu kita memahami karakteristik kekuasaan yang sah dan demokratis dari Arendt, terutama memosisikannya dalam hubungannya dengan teori tindakan.⁴³

Salah satu aspek teori tindakan Arendt adalah kebebasan. Tindakan itu sendiri adalah realisasi kebebasan karena berakar dalam peristiwa kelahiran manusia. Tindakan sebagai *differentia spesifica* yang membedakan manusia dengan binatang memang paling tepat ditempatkan dalam konteks natalitas, karena di situlah tindakan sebagai ekspresi kebebasan menemukan maknanya yang penuh. Melalui tindakan, seorang manusia yang baru lahir menyingkapkan diri supaya dikenal dunia.⁴⁴ Tindakan adalah ekspresi kebebasan, karena melaluinya manusia berinisiatif dan melakukan hal yang tidak terantisipasi guna melatih kapasitas kebebasan yang diberikan kepadanya saat terlahir ke dunia.⁴⁵ Demikianlah, tindakan sebagai ekspresi kebebasan haruslah bersih dari rekayasa atau bentuk pengekangan apa pun. Tindakan juga memberi ruang bagi unsur kejutan (*unpredictability*).

Kekerasan tidak memenuhi semua syarat untuk dapat disebut sebagai tindakan yang bebas. Kekerasan sebagai semata-mata alat meraih dan mempertahankan kekuasaan menutup semua ruang diskursus. Kekerasan memberangus inovasi, menutup rapat aspek kejutan (*unpredictability*), dan tidak menoleransi penyingkapan diri (*disclosure*). Kekerasan yang semata-mata sebagai alat politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan tidak dapat dibenarkan justru karena ia memberangus ruang publik dan menganeksasi ruang privat manusia dengan menebar teror.

43 Passerin d'Enteves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, hlm. 109-167.

44 "... the new beginning inherent in birth can make itself felt in the world only because the new comer possesses the capacity of beginning something anew, that is, of acting." Hannah Arendt, *The Human Condition*, sebagaimana dikutip dari Maurizio Passerin d'Enteves, "Hannah Arendt," in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), edited by Edward N. Zalta, <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/arendt/>. Diakses pada 11 Maret 2011.

45 Passerin d'Enteves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, hlm. 115.

Watak kekerasan yang demikian mencegah dorongan alamiah penyingkapan diri.

Aspek lain dari teori tindakan menurut Arendt adalah pluralitas.⁴⁶ Dengan pluralitas Arendt memaksudkannya sebagai “*the fact that man, not Man, live on the earth and inhabit the world.*” Inilah kondisi yang diprasyarkan bagi tindakan manusia, karena “*we are all the same, that is human, in such a way that nobody is ever the same as anyone else who ever lived, lives, or will live.*”⁴⁷ Bagi Arendt, tindakan sebagai manifestasi kebebasan mengandaikan pluralitas. Artinya, tindakan tidak dapat terisolasi dari orang lain. Tindakan sebagai pengungkapan diri terjadi dalam ruang publik di mana seseorang menyatakan diri dalam dan melalui perkataan dan tindakan. Setiap orang yang menyatakan diri dalam ruang publik adalah setara sekaligus berbeda.⁴⁸ Bagi Arendt, kekerasan sebagai alat politik untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan hanya akan menciderai kondisi-kondisi manusia yang adalah setara sekaligus berbeda. Kekerasan tidak hanya menutup peluang bagi penyingkapan diri, tetapi juga menyangkal kesetaraan manusia. Kekerasan memanipulasi bahasa dan tindakan dan mengubahnya menjadi dua entitas yang berbeda.

Dari sini konsep kekuasaan Arendt dapat dirumuskan secara lebih tepat. Kekuasaan adalah wujud tindakan bebas manusia. Kekuasaan yang dibentuk dalam sebuah komunitas politik atau sebuah ruang publik ini merupakan sebuah “konsensus” bersama antarindividu yang bebas dan setara. Sebagai sebuah konsensus, kekuasaan dicapai melalui diskursus yang rasional dan terbuka, di mana setiap individu menyatakan kepentingan-kepentingannya (*self-disclosure*) tanpa rekayasa dan tipu muslihat, di mana kesatuan antara perkataan (*speech*) dan perbuatan (*deeds*) menjadi syarat utama diskursus politik.

46 Passerin d’Enteves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, hlm. 118.

47 Hannah Arendt, *The Human Condition*, sebagaimana dikutip dari Maurizio Passerin d’Enteves, “Hannah Arendt,” in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), edited by Edward N. Zalta, <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/arendt/>. Diakses pada 11 Maret 2011.

48 Passerin d’Enteves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, hlm. 120.

Dengan pemahaman semacam ini, Arendt berpendapat bahwa kekuasaan hanya mungkin direalisasikan dalam sebuah *polis*. Menurut Passerin, *polis* adalah sebuah metafor, karena Arendt tidak memaksudkannya sebagai sebuah realitas politik historis sebagaimana pernah eksis di Yunani lebih dari dua ribu lima ratus tahun silam.⁴⁹ Dengan *polis*, Arendt memaksudkan bukan sebuah negara kota secara fisik, tetapi lebih sebagai “... the organization of the people as it arises out of acting and speaking together, and its true space lies between people living together for this purpose, no matter where they happen to be.”⁵⁰

Jika Arendt membayangkan sebuah ruang publik sebagai tempat di mana setiap individu bebas mengungkapkan kepentingan-kepentingannya, ruang publik itu adalah *polis*. Di tangan Arendt, *polis* menjadi sebuah ruang penyingkapan “where I appear to the others as others appear to me, where men exist not merely like other living or inanimate things, but to make their appearance explicitly.”⁵¹ *Polis* sebagai “ruang penyingkapan” akan terus diciptakan kapan dan di mana pun. Melalui *polis*lah setiap individu berkumpul secara politik, mengungkapkan kepentingan-kepentingannya dan sepakat untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Bagi Arendt, kekuasaan dengan karakteristik demikian tidak pernah sekali dibentuk untuk selamanya. Kekuasaan harus selalu dikonstruksikan dan terbuka terhadap kenyataan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam *polis* sebagai “ruang penyingkapan” (*space of appearance*) dengan watak yang demikian, kekuasaan dijalankan sebagai “an act in concert” yang legitimasinya adalah konsensus yang telah disepakati.⁵²

Apakah kekerasan dapat absen dari sebuah praktik kekuasaan dalam *polis*? Bagi Arendt, kekerasan tidak mungkin dapat dilenyapkan dari *polis*. Sebuah komunitas politik yang telah terbentuk akan segera diikuti oleh semacam godaan untuk menjadikannya bukan sebagai “ruang penyingkapan” (*space of appearance*), tetapi sebagai manifestasi kekuasaan yang

49 Passerin d’Enteves, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, hlm. 129.

50 Hannah Arendt, *The Human Condition*, p. 198.

51 Hannah Arendt, *The Human Condition*, p. 198.

52 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 52.

semakin birokratis. Birokrasi kekuasaan hanya akan melahirkan kekerasan karena tersumbatnya ruang bagi interaksi perkataan dan perbuatan.⁵³

Godaan ini tidak hanya real tetapi sekaligus menegaskan eksistensi kekerasan dalam politik. Semakin sebuah komunitas politik bersifat demokratis – demokrasi partisipatoris – semakin terbebaslah ia dari godaan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan kekerasan sebagai senjata.⁵⁴ Dalam pemikiran Arendt, kekerasan dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan.⁵⁵ Dengan catatan, praktik kekerasan untuk mengembalikan keadaan *polis* ke konsensus bersama bukanlah sebuah tindakan yang irasional, tetapi kekerasan sebagai sebuah tindakan rasional.⁵⁶ Kekerasan rasional bukanlah tujuan politik, tetapi sarana untuk mengembalikan keadaan *polis* di mana kebebasan dan kesetaraan dijamin.

BAHAYA KESEWENANG-WENANGAN NEGARA

Sejauh mana gagasan mengenai kekerasan sebagai alat kekuasaan berhadapan dengan para pembangkang demokrasi dapat ditempatkan dalam konteks tindakan politik dewasa ini? Keith Breen dalam tulisannya⁵⁷ tampak menegaskan posisi Arendt, bahwa kekuasaan dan kekerasan tidak dapat dilihat sebagai dua hal yang saling bertentangan.

53 Arendt menyebut kekuasaan yang birokratis sebagai kekuasaan anonim yang diselenggarakan oleh para administrator. Dalam konteks kekuasaan semacam ini, orang merasa seolah-olah bertindak bersama, padahal mereka tidak lebih dari alat di tangan para administrator yang senantiasa berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 81-83.

54 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 22.

55 Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 63-64.

56 Tindakan yang irasional itu adalah *self-defence*. Wujudnya adalah perilaku agresif dan kemarahan tanpa kendali (*rage*), jadi bersifat emosional. Hannah Arendt, *On Violence*, p. 64. Menurut Arendt, kekerasan sebagai instrumen politik harus berwatak rasional dalam pengertian kekerasan sebagai satu-satunya sarana yang tersedia untuk memulihkan kekuasaan yang demokratis. Kekerasan berwatak rasional jika memenuhi beberapa syarat: bersifat efektif dalam mencapai tujuan, yakni pemulihan keadaan kacau; terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan; digunakan dalam jangka waktu pendek; dan tidak bersifat diskriminatif. Hannah Arendt, *On Violence*, pp. 79-80.

57 Keith Breen, "Violence and Power: A Critique of Hannah Arendt on the 'Political,'" *Philosophical and Social Criticism* 33 (2007): 343-372.

Bagi Breen, kekuasaan dan kekerasan adalah unsur implisit dalam setiap relasi politik. "Kekerasan bersemayam di jantung politik," tulis pengajar filsafat politik dari Queen's University, Belfast ini.⁵⁸

Arendt memang berpendapat bahwa kekerasan pertama-tama bukanlah alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, tetapi sarana untuk mengembalikan komitmen awal terbentuknya kekuasaan politik. Kekerasan sebagai alat untuk merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan yang tidak sah justru akan menghancurkan kekuasaan itu sendiri. Jelas bagi Arendt, bahwa praktik kekerasan dapat dibenarkan jika diarahkan kepada orang atau kelompok sosial yang menyelewengkan kesatuan antara perkataan (*speech*) dan perbuatan (*deeds*) karena berbagai alasan yang sifatnya parsial.⁵⁹ Kekerasan sebagai alat mempertahankan kekuasaan yang sah dan demokratis dalam pemikiran Arendt harus menjadi pilihan terakhir yang diambil ketika ruang publik atau polis sedang mengalami kekacauan. Kekerasan dalam pemikiran Arendt akan menjadi keadaan politik sesaat menuju stabilitas politik dan pemeliharaan ruang publik. Dalam arti ini, tampaknya Arendt memahami praktik atau tindakan politik sebagai kemampuan mengombinasikan "*revolution and preservation in a constitutional law that is relational, not commanding.*"⁶⁰ Praktik atau tindakan politik harus dilihat sebagai tindakan bersama mengkonstruksi ruang publik di mana setiap kepentingan bersama diwacanakan secara demokratis, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat diakses oleh setiap warga negara, dan di mana setiap orang memaknai identitasnya sebagai bagian dari ruang publik tersebut. Ruang publik yang demokratis lalu menjadi tempat penyingkapan diri, bahwa "*Our political activities constitute a common world in which the relationship established with others*

58 Keith Breen, "Violence and Power: A Critique of Hannah Arendt on the 'Political,'" p. 367.

59 Dalam praktik politik, kekerasan dapat dibenarkan karena kekerasan dapat menjadi sarana untuk mengembalikan kedamaian dan stabilitas, membangun kembali solidaritas yang rusak dan memulihkan kembali kondisi manusia supaya setiap orang dapat bebas menyatakan dirinya. Keith Breen, "Violence and Power: A Critique of Hannah Arendt on the 'Political,'" p. 360.

60 Keith Breen, "Violence and Power: A Critique of Hannah Arendt on the 'Political,'" p. 361.

also provide us with a distinctive identity, while the existence of some commonality already in place gives us a location for our political actions."⁶¹ Sementara itu, proses-proses politik yang demokratis dibayangkan sebagai proses politik yang pertama-tama menghasilkan sebuah *constitutional law*, tetapi kemudian menjadi usaha mempertahankan *constitutional law* sebagai pengikat sekaligus jaminan bahwa berbagai kepentingan akan terakomodasi. Proses menghasilkan *constitutional law* dan mempertahankannya dilihat sebagai satu kesatuan dalam setiap tindakan politik.

Harus diakui, jika konsensus awal yang telah disepakati adalah sebuah kehendak bersama – semacam "*identical will*" dalam pemahaman Keith Breen – maka kehendak bersama ini akan mudah direalisasikan dalam sebuah *polis* atau ruang publik sejauh sistemnya adalah demokrasi partisipatoris. Ruang publik yang demokratis, yang mengakomodasi berbagai kepentingan dalam tindakan politik sebagai "tindakan bersama" memprasyaratkan demokrasi partisipatoris sebagai mediumnya. Hanya melalui demokrasi partisipatorislah setiap warga negara benar-benar berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab penyelenggaraan negara. Itulah makna mendasar dari tindakan politik sebagai "*to act in concert*."⁶²

Di sini Arendt lupa, bahwa "*identical will*," kehendak bersama, konsensus atau apa pun namanya, sering bersifat sangat kejam terhadap berbagai "*specific will*" yang sifatnya parsial dan periferi. Dalam ruang publik yang lebih kompleks, "*identical will*" atau kehendak umum seringkali justru lebih ditentukan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, status sosial atau akses terhadap media massa dari pada hasil sebuah konsensus bersama yang bebas dan terbuka tanpa gejala.⁶³ Keberatan ini mau menegaskan bahwa "*identical will*" hanya

61 John MacGowan, *Hannah Arendt: An Introduction* (Minnesota, Min.: University of Minnesota Press, 1998). pp. 39-40.

62 Hannah Arendt, *On Violence*, p. 83. Lihat juga Hannah Arendt, *On Revolution* (London: Penguin Books, 1965), p. 255.

63 Arendt sangat menekankan pentingnya "*being present in a public sphere*," yakni berpartisipasi secara aktif dalam ruang publik. Bagaimana dengan orang atau kelompok sosial yang tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses-proses politik di ruang publik karena keterbatasan-keterbatasan tertentu? Pertanyaan ini tampaknya sulit di-

akan menjadi ilusi persis ketika kehendak individu atau kelompok tertentu dianggap sebagai parsial dan periferi. Arendt membayangkan sebuah proses perumusan kehendak bersama yang terjadi secara alamiah sebagai sebuah proses politik yang terkait erat dengan kondisi manusia, padahal tidak ada jaminan bahwa kehendak minoritas – “*specific will*” dalam pemahaman Keith Breen – akan ikut diakomodasi. Dalam arti itu tirani mayoritas tidak akan pernah dapat dibebaskan sepenuhnya dari praktik politik yang demokratis. Tidak ada jaminan bahwa kepentingan orang atau kelompok sosial yang dieksklusikan dalam proses pencapaian kehendak bersama itu tidak akan menimbulkan kekacauan dan gejolak politik selain pandangan Arendt bahwa kekerasan dapat digunakan sebagai alat untuk mengembalikan kekacauan kepada konsensus awal.

Kekerasan sebagai benteng terakhir mempertahankan kekuasaan yang demokratis pun dapat melahirkan kesewenang-wenangan negara. John McGowan melihat bahwa Arendt lupa bahwa kekuasaan yang sah dan demokratis yang membenarkan praktik kekerasan sebagai alat mempertahankan eksistensinya justru memberi ruang bagi negara untuk memonopoli dan mengontrol warga negara mengatasnamakan kepentingan umum.⁶⁴ Negara seakan-akan terjebak dalam ancaman pembangkangan dan karena itu berusaha memonopoli kekerasan sedemikian rupa sebagai cara mencegah tampilnya kelompok tertentu yang dapat mendominasi kelompok lainnya. Negara, dengan demikian, mempraktikkan kekuasaan bukan sebagai “*to act in concert*,” tetapi sebagai penjamin keamanan. Lebih buruk lagi jika praktik penyelenggaraan negara berada di tangan sekelompok orang yang kekuasaannya bersifat sah, tetapi yang kemudian mengubah praktik politik menjadi lebih birokratis dan elitis. Hal terakhir ini membuka ruang bagi tidak hanya monopoli kekuasaan dan kekerasan oleh negara, tetapi sekaligus juga oleh kelompok

jawab hanya dengan mengacu pada pemikiran Arendt tentang proses pembentukan “*identical will*” dalam *polis*. Lihat Maurizio Passerin d’Entreves, “Hannah Arendt,” in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), edited by Edward N. Zalta, <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/arendt/>. Diakses pada 11 Maret 2011.

64 John McGowan, *Hannah Arendt: An Introduction*, p. 82.

tertentu. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa watak kekuasaan seperti ini gagal menciptakan ruang publik sebagai tempat setiap warga negara mendefinisikan diri sekaligus mendiskusikan kepentingan bersama persis ketika mereka dihindangi ketakutan mengekspresikan kepentingannya di hadapan ancaman penggunaan kekerasan oleh negara. Negara yang mementingkan terciptanya stabilitas dan keamanan sebagaimana dibayangkan Arendt justru menyangkal dimensi kebebasan, identitas, dan intersubjektivitas tindakan politik warga negara yang sebenarnya adalah cita-citanya sendiri yang ingin diwujudkan.⁶⁵

Untuk mencegah praktik politik yang membuka ruang bagi kehadiran tirani mayoritas ataupun monopoli kekuasaan oleh negara, demokrasi partisipatoris sebagaimana dipahami Arendt harus dipraktikkan bersama-sama dengan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).⁶⁶ Demokrasi partisipatoris yang mengandaikan praktik politik yang terbuka, setara, dan adil hanya dapat dipraktikkan dalam *polis* atau ruang publik yang relatif homogen dan terbatas.⁶⁷ Sementara dalam masyarakat yang lebih heterogen dan kompleks, demokrasi konstitusional akan memberikan jaminan bahwa hukum yang mengatur kehidupan bersama dirumuskan dan diputuskan oleh para wakil rakyat secara adil dan terbuka dengan mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu sudah terwakilkan dalam diri para wakil rakyat yang telah dipilih masyarakat tersebut. Hal ini diharapkan dapat mencegah tirani mayoritas sekaligus membendung potensi gejolak politik dan kekerasan karena tidak terakomodasinya berbagai kepentingan politik.

Bagaimanapun, pemahaman Arendt tentang kekerasan dan kekuasaan tetap relevan. Pluralitas dan kebebasan sebagai karakteristik

65 John McGowan menulis, "From Arendt's point of view, a minimalist politics is a pathology denial of dependence on others, a pathology indicated by its being able to acknowledge others only as threats to the individual." John McGowan, *Hannah Arendt: An Introduction*, pp. 82-83.

66 David T. Koyzis, *Political Vision & Illusions* (Illinois: InterVarsity Press, 2003), pp. 135-136.

67 Mengenai hal ini, David T. Koyzis mengkritik Hannah Arendt, katanya, "Sovereignty itself is problematic for Arendt because it denies the human condition of plurality and pretends that only one person inhabits the world." David T. Koyzis, *Political Vision & Illusions*, p. 136.

utama diskursus politik di ruang publik menjadi landasan tak tergantikan dari sebuah pemerintahan yang demokratis. Kekerasan, sejauh sebagai praktik penegakan hukum yang adil, akan menjadi alat yang sah dalam menjaga dan mempertahankan konsensus awal atau kehendak bersama. Kekuasaan yang mendasarkan diri pada kekerasan hanya akan menjadi teror bagi warga negaranya. Sebaliknya, kekuasaan tanpa kekerasan yang sah untuk memelihara dan mempertahankan konsensus awal hanya akan menjadi sebuah cita-cita politik yang sulit direalisasikan.⁶⁸

PENUTUP

Penulis telah menunjukkan pemikiran Hannah Arendt mengenai eksistensi kekerasan dalam kekuasaan. Terhadap pertanyaan apakah kekerasan dapat dibenarkan dalam kekuasaan, Arendt berpendapat bahwa kekerasan adalah alat yang dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang sah dan demokratis dari bahaya pembangkangan orang atau kelompok tertentu. Penggunaan kekerasan dalam kekuasaan hanya dapat dibenarkan jika itu merupakan pilihan terakhir berhadapan dengan ancaman terhadap kekuasaan.

Posisi penulis terhadap pemikiran Arendt tampak dalam bagian terakhir tulisan ini. Ruang publik sebagaimana dicita-citakan Arendt gagal mengakomodasi pluralitas masyarakat dan aneka kepentingan politik jika praktik politik hanya berkiblat pada model demokrasi partisipatoris. Sementara itu, demokrasi konstitusional yang hanya memberi ruang bagi demokrasi formal dapat melupakan esensi demokrasi itu sendiri sebagai penciptaan kehidupan bersama di mana berbagai cita-cita dan kepentingan diakomodasi demi perwujudan sebuah cita-cita bersama. Arendt layak diapresiasi ketika ia mengingatkan kita untuk kembali ke cita-cita demokrasi partisipatoris tanpa harus melihat penggunaan kekerasan sebagai ancaman terhadap kebebasan individu dalam praktik politik di mana eksistensi demokrasi konstitusional sanggup mengontrol

68 Bdk. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm 172-175.

kesewenang-wenangan negara di ruang publik.

Artikel ini menyisakan sebuah pertanyaan: sejauh mana tindakan politik dalam ruang publik yang mengombinasikan demokrasi partisipatoris dan demokrasi konstitusional mampu meredam tindakan irasional warga negara yang memaksakan kepentingannya untuk diakui sebagai kepentingan bersama dalam konteks di mana demokrasi partisipatoris sendiri belum berakar secara mendalam? Perdebatan dan diskusi lebih lanjut diharapkan dapat menjawab pertanyaan mendasar ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adams, Ian. *Political Ideology Today*. New York: Manchester University Press, 2001.
- Arendt, Hannah. *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- _____. *On Revolution*. London: Penguin Books, 1965.
- _____. *On Violence*. New York: A Harvest Book, 1970.
- Breen, Keith. "Violence and Power: A Critique of Hannah Arendt on the 'Political.'" *Philosophy and Social Criticism* 33 (2007): 343-372.
- d'Entreves, Maurizio Passerin. *Filsafat Politik Hannah Arendt*. Yogyakarta: Qalam, 2003.
- _____. "Hannah Arendt." In Edward N. Zalta, ed., *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2008 Edition), <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/arendt/>. Diakses pada 11 Maret 2011.
- Jena, Yeremias. "Kejahatan yang Banal dan Kekerasan Oleh Negara: Refleksi Hannah Arendt atas Pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem." *Respons* 14 (2009): 147-176.
- Koyzis, David T. *Political Vision & Illusions*. Illinois: InterVarsity Press, 2003.
- MacGowan, John. *Hannah Arendt: An Introduction*. Minnesota University of Minnesota Press, 1998.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Molan, Benyamin. "Hannah Arendt: Kekerasan Bukan Tindakan Politik, Namun Bukan Tanpa Risiko." *Respons* 14 (2009): 49-68.
- Popenoe, David. *Sociology*. 11th Edition. New Jersey: Prentice Hall, 1999.